

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil dan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa setiap ada peningkatan nilai Dana Alokasi Umum maka akan menurunkan nilai Kemandirian Keuangan Daerah, begitupula sebaliknya.
2. Hasil uji parsial menunjukkan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan nilai Dana Alokasi Umum maka akan menurunkan nilai Kemandirian Keuangan Daerah, begitupula sebaliknya.
3. Hasil uji simultan diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran:

1. Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka masing-masing. Dengan meningkatnya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah tersebut akan terlaksana dengan baik. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga harus mulai bertahap mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sehingga salah satu tujuan dari Otonomi Daerah yaitu terciptanya Pemerintah Daerah yang mandiri dapat tercapai.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta menambah periode pengamatan penelitian.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menentukan sampel pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi lain di Indonesia untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten / Kota tersebut dengan menggunakan periode pengamatan penelitian terbaru sehingga didapatkan hasil penelitian yang akurat.